

THE INFLUENCE OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS, USE OF INFORMATION TECHNOLOGY, HUMAN RESOURCES (HR) COMPETENCIES ON THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTING MINISTRY OF VILLAGES, DEVELOPMENT OF DISADVANTAGED AREAS AND TRANSMIGRATION THROUGH THE GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM

PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI MELALUI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Dimas Hardiansyah¹, Hasanudin²

^{1,2}Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional
dimashardiansyah234@gmail.com¹, hasanudinsadikin910@gmail.com²

ABSTRACT

This study analyzes the influence of Government Accounting Standards (SAP), Information Technology Utilization, and Human Resource Competence (SDM) on the Government Internal Control System (SPIP) and the Quality of Financial Reports. The results indicate that SAP and SDM Competence have a significant positive impact on SPIP, while Information Technology Utilization does not have a significant effect. SAP and SDM Competence also positively affect the Quality of Financial Reports, both directly and through SPIP, whereas Information Technology Utilization has a direct but not significant effect through SPIP. This study emphasizes the importance of strengthening SPIP, enhancing SDM competence, and utilizing appropriate information technology to achieve accountable and transparent public financial management. It is expected to serve as a reference for improving the quality of government financial management.

Keywords: *Government Accounting Standards, Information Technology, Human Resources (HR) Competencies, Quality of Financial Reports of the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAP dan Kompetensi SDM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap SPIP, sementara Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan. SAP dan Kompetensi SDM juga berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, baik secara langsung maupun melalui SPIP, sedangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh langsung namun tidak signifikan melalui SPIP. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan SPIP, peningkatan kompetensi SDM, dan penggunaan teknologi informasi yang tepat untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, serta diharapkan menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintah, Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diterbitkan setiap tahun, dan komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan pemerintah

pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 sejak Indonesia merdeka sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Jadi sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai dengan tahun 2003 Pemerintah Indonesia tidak pernah membuat Laporan Keuangan. Era baru manajemen keuangan negara dimulai pada tahun 2003 dengan terbitnya 3 (tiga) paket Undang-

Undang (UU) di bidang Keuangan Negara yaitu UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, UU Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 dan UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Nomor 15 Tahun 2004. Ketiga undang-undang tersebut mereformasi manajemen keuangan negara, salah satunya terkait dengan pertanggungjawaban APBN/APBD. Dalam ketentuan tersebut diamanatkan agar Presiden RI dan kepala daerah menyampaikan laporan keuangan kepada DPR RI/DPRD paling lambat 6 (enam) bulan sesudah berakhir tahun anggaran, setelah diaudit oleh BPK RI.

Saat ini laporan keuangan pemerintah pusat disusun berdasarkan penerapan akuntansi basis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP disusun oleh suatu komite yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). KSAP bertugas mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Dalam memberikan opini BPK mengklasifikasikan kedalam 4 (empat) jenis antara lain (i) wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). Fenomena yang terjadi dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Opini BPK pertama kali diberikan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2004. Sejak 2004 hingga 2008 opini BPK terhadap LKPP adalah *disclaimer* (tidak memberikan pendapat). Baru pada tahun 2009 LKPP memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sampai dengan tahun 2015. Selanjutnya LKPP memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian sejak LK Tahun 2016

sampai dengan sekarang yaitu LK Tahun 2022.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjadi salah satu kementerian yang memperoleh opini WTP dari tahun 2018-2022. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sendiri dibentuk pada tahun 2014 merupakan Kementerian yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Abdul Halim Iskandar.

Sejak pertama kali berdiri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah dilakukan pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan sebanyak 8 (delapan) tahun anggaran sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Untuk tahun anggaran 2015 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memperoleh opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi baru memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk tahun anggaran 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022.

Tingkat kualitas suatu laporan keuangan dapat ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal dalam organisasi itu sendiri. Jika pengendalian internal tersebut lemah atau rendah maka dalam mendeteksi adanya kecurangan dalam suatu proses penyusunan laporan keuangan akan sulit sehingga bukti audit yang diperoleh perusahaan dari informasi/data akuntansi tidak akan kompeten. Dalam memberikan opini, BPK melihat tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu : 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, 2. Kecukupan pengungkapan

(adequate disclosures), 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Fenomena yang terjadi diantaranya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi masih banyak yang kurang memahami SAP. Dari sisi teknologi informasi seringkali ditemukan di lapangan bahwa begitu minimnya aparatur yang memahami dalam pengaplikasian teknologi informasi. Selain itu adanya perkembangan teknologi informasi yang ke depan diprediksi akan bertambah baik dan terus mengikuti perkembangan zaman menyebabkan fasilitas-fasilitas penunjang pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan dan dilengkapi agar tidak tertinggal namun kenyataannya fasilitas-fasilitas pemanfaatan teknologi informasi tersebut ternyata masih belum maksimal dalam pemenuhannya.

Dilihat dari sisi kompetensi sumber daya manusia, masih dinilai kurang memadai yang mana dilihat dari latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya. Sementara pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) dinilai masih belum stabil penerapannya. Tabel 1.4 menunjukkan *research gap* pengaruh antara variabel yaitu Standar Akuntansi Pemerintah sebagai variabel independent terhadap Kualitas Laporan keuangan sebagai variabel dependent yang telah diuji oleh peneliti terdahulu yang memiliki hasil yang berbeda.

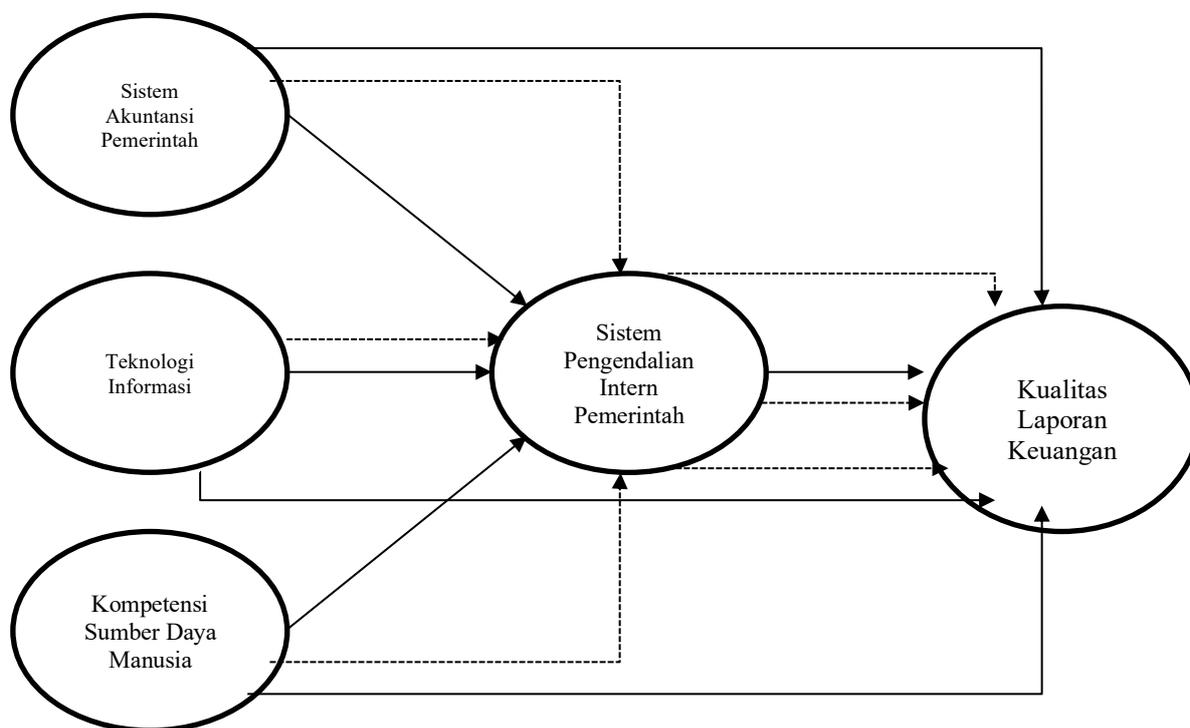
Dari penjelasan diatas, peneliti akan mengeksplorasi hubungan kompleks antara standar akuntansi

pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Faktor yang semakin mendapatkan perhatian adalah dampak dari sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pengaruh standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia (sdm) terhadap kualitas laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tetapi juga membahas sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel mediasi (intervensi) dapat menjadi faktor penting dalam hubungan sehingga penelitian ini berjudul **“Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”**.

METODE PENELITIAN

Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian ini menjelaskan pengaruh variabel-variabel dari Sistem Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan menghadirkan variabel intervening berupa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Terdapat 3 variabel independen dan 1 variabel dependen dan 1 variabel intervening dalam kerangka pikir penelitian ini, yaitu:



Keterangan:

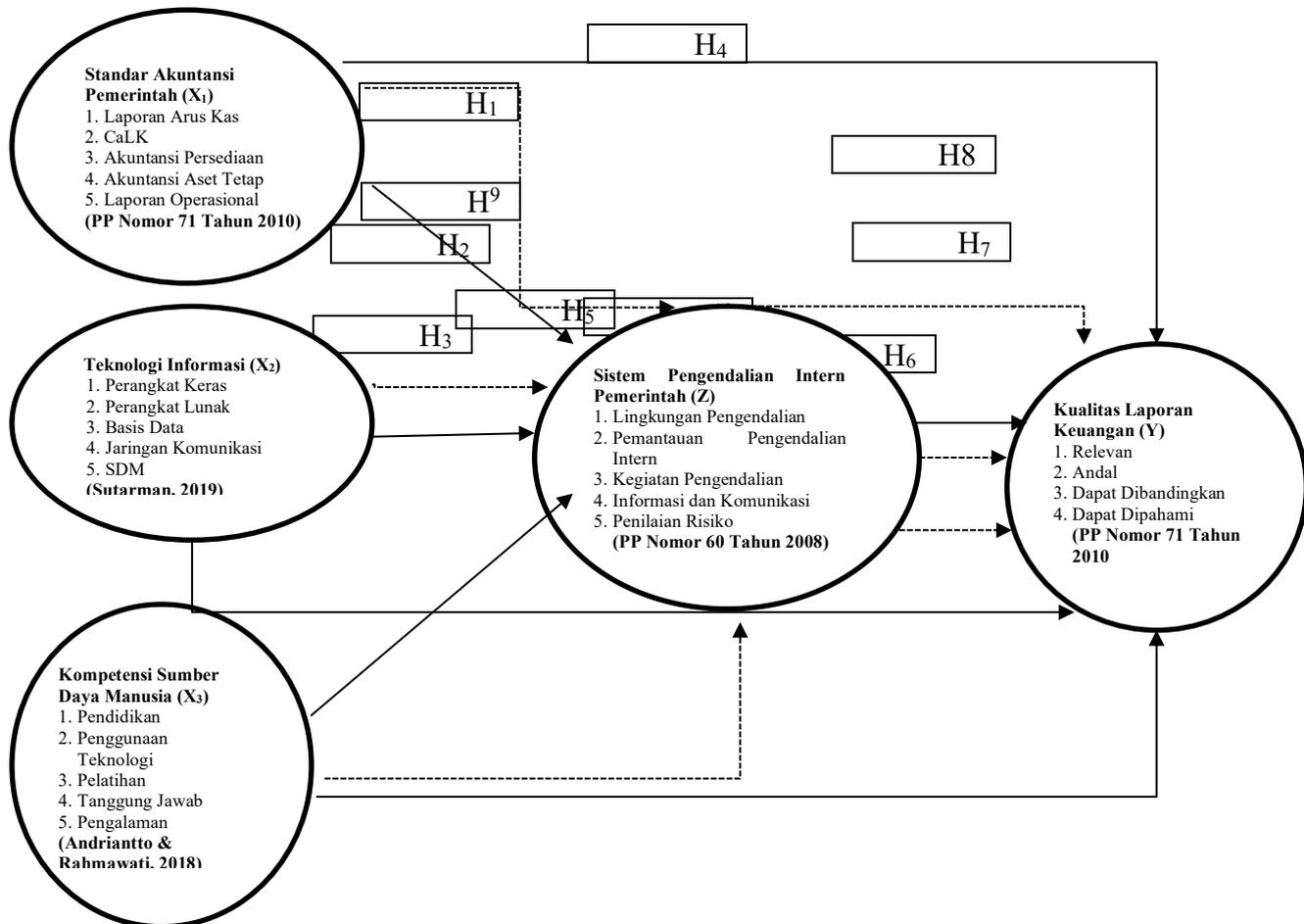
- > = Pengaruh Langsung
- - - - -> = Melalui Variabel Intervening

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka Model Penelitian

Berdasarkan referensi teori dan penelitian terdahulu serta tinjauan pustaka, penelitian ini melakukan pengujian pada Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi

Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.



Keterangan:

- > = Pengaruh Langsung
- - - - -> = Melalui Variabel Intervening

Gambar 2. Kerangka Model Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Outer Model (*Measurement Model*): Pengujian Validitas dan Realibilitas

Uji outer model dilakukan untuk memastikan bahwa *measurement* (model pengukuran) yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliable). Analisa Outer Model ini untuk mengetahui hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya, atau dapat dikatakan bahwa outer model

mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Tiga kriteria pengukuran digunakan dalam teknik analisa data menggunakan WarpPLS untuk menilai model. Tiga pengukuran itu adalah Convergent validity, Reliability, nilai AVE, dan Discriminant validity.

Uji Convergent Validity

Validitas konvergen model pengukuran dengan indeks reflektivitas

dinilai berdasarkan korelasi antara skor komponen fraksional yang dihitung menggunakan PLS. Studi eksplorasi dengan nilai loading factor antara 0,6 - 0,7 masih dapat diterima jika nilai loading factor lebih besar dari 0,7 dan konstruk terukur yang digunakan untuk studi konfirmatori serta nilai mean variance extraction (AVE) harus lebih besar dari 0,5. Namun menurut Chin

dalam (Ghozali, 2019) “penelitian pada tahap awal pengembangan skala pengukuran untuk nilai loading factor 0,5 sampai 0,6 masih dianggap memadai.

Dalam penelitian ini menggunakan batasan 0,7, jadi indikator yang nilai loading faktor di atas 0,7 dinyatakan valid. Berikut ini adalah hasil uji validitas:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Item (*Convergent Validity*)

Variabel	Item	Nilai Outer Loading	Batasan Nilai Outer Loading	Keputusan
Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	SAP1	0,94	0,7	Valid
	SAP2	0,94	0,7	Valid
	SAP3	0,934	0,7	Valid
	SAP4	0,933	0,7	Valid
	SAP5	0,932	0,7	Valid
	SAP6	0,926	0,7	Valid
	SAP7	0,921	0,7	Valid
	SAP8	0,946	0,7	Valid
	SAP9	0,921	0,7	Valid
Teknologi Informasi (X2)	TI1	0,903	0,7	Valid
	TI2	0,896	0,7	Valid
	TI3	0,93	0,7	Valid
	TI4	0,871	0,7	Valid
	TI5	0,928	0,7	Valid
	TI6	0,931	0,7	Valid
	TI7	0,915	0,7	Valid
	TI8	0,878	0,7	Valid
	TI9	0,729	0,7	Valid
	TI10	0,905	0,7	Valid
	TI11	0,894	0,7	Valid
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)	SDM1	0,86	0,7	Valid
	SDM2	0,784	0,7	Valid
	SDM3	0,916	0,7	Valid
	SDM4	0,844	0,7	Valid
	SDM5	0,921	0,7	Valid
	SDM6	0,766	0,7	Valid
	SDM7	0,908	0,7	Valid
	SDM8	0,928	0,7	Valid
	SDM9	0,929	0,7	Valid
	SDM10	0,93	0,7	Valid
	SDM11	0,922	0,7	Valid
	SDM12	0,914	0,7	Valid
	SDM13	0,887	0,7	Valid
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Z)	SPIP1	0,916	0,7	Valid
	SPIP2	0,92	0,7	Valid
	SPIP3	0,929	0,7	Valid
	SPIP4	0,928	0,7	Valid

	SPIP5	0,848	0,7	Valid
	SPIP6	0,833	0,7	Valid
	SPIP7	0,875	0,7	Valid
	SPIP8	0,901	0,7	Valid
	SPIP9	0,911	0,7	Valid
	SPIP10	0,935	0,7	Valid
	SPIP11	0,917	0,7	Valid
	SPIP12	0,901	0,7	Valid
	SPIP13	0,917	0,7	Valid
	SPIP14	0,886	0,7	Valid
	SPIP15	0,947	0,7	Valid
	SPIP16	0,911	0,7	Valid
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	KLK1	0,925	0,7	Valid
	KLK2	0,94	0,7	Valid
	KLK3	0,946	0,7	Valid
	KLK4	0,93	0,7	Valid
	KLK5	0,893	0,7	Valid
	KLK6	0,937	0,7	Valid
	KLK7	0,924	0,7	Valid
	KLK8	0,911	0,7	Valid
	KLK9	0,935	0,7	Valid
	KLK10	0,949	0,7	Valid

Sumber: Data diolah dengan WarpPLS, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui semua item nilai loading faktor (*outer loading*) sudah di atas 0,7 semua. Jadi item-item tersebut dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas (Composite Reliability dan Cronbach Alpha) dan Uji Average Variance Extracted (AVE)

1. Uji Reliabilitas

Menurut (Ghozali, 2019) “menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan handal atau reliabel jika jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner tersebut

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.” Pengujian reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan akurasi, konsistensi dan akurasi instrumen dalam mengukur struktur. Reliabilitas konstruk dengan indikator reflektivitas dapat diukur dengan dua cara, yaitu Cronbach Alpha dan reliabilitas komposit. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha dan Composite Reliability lebih dari 0,7 untuk penelitian confirmatory dan nilai 0,6 – 0,7 masih dapat diterima untuk penelitian eksplorator.

Berikut merupakan data hasil analisis dari pengujian Cronbach alpha dan Composite reliability:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Batas Reliabilitas	Keputusan
SAP (X1)	0,981	0,984	0,700	Reliabel
Pemanfaatan TI (X2)	0,974	0,977	0,700	Reliabel
Kompetensi SDM (X3)	0,977	0,979	0,700	Reliabel
Kualitas LK (Z)	0,985	0,986	0,700	Reliabel
SPIP (Y)	0,982	0,984	0,700	Reliabel

Sumber: Data diolah dengan WarpPLS, 2024

Hasil pengujian berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil Composite reability maupun Cronbach alpha menunjukkan nilai yang memuaskan yaitu nilai masing-masing variabel diatas nilai 0,70. Hal tersebut menunjukkan konsistensi dan stabilitas instrumen yang digunakan tinggi. Dengan kata lain semua konstruk atau variabel penelitian ini sudah menjadi alat ukur yang fit, dan semua pertanyaan yang digunakan untuk mengukur masing-masing konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

2. Uji Average Variance Extracted (AVE)

Nilai AVE dapat menggambarkan besaran varian atau keragaman variabel manifes yang dapat dikandung oleh konstruk laten. Untuk ideal yang ada pada AVE yaitu 0,5 hal ini berarti convergent validity baik, artinya variabel laten dapat menjelaskan rata-rata lebih dari setengah varian dari indikator-indikatornya.

Kriteria AVE agar suatu variabel valid adalah harus di atas 0,50 (Haryono, 2017). Hasil output nilai AVE dapat dilihat pada tabel di atas.

Tabel 3. Hasil Uji Nilai Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Nilai AVE	Batas Nilai AVE	Keputusan
SAP (X1)	0,870	0,500	Terpenuhi
Pemanfaatan TI (X2)	0,793	0,500	Terpenuhi
Kompetensi SDM (X3)	0,787	0,500	Terpenuhi
Kualitas LK (Z)	0,819	0,500	Terpenuhi
SPIP (Y)	0,863	0,500	Terpenuhi

Sumber: Data diolah dengan WarpPLS, 2024

Dapat diketahui bahwa semua variabel mempunyai nilai AVE lebih dari 0,5, sehingga variabel tersebut memiliki konstruk validitas yang baik.

3. Uji Discriminant Validity

Discriminant validity merupakan nilai *cross loading* faktor yang berguna untuk mengetahui apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai atau tidak.

Beberapa cara untuk melihat Discriminant validity adalah sebagai berikut:

1) Melihat nilai Cross loading

Discriminant validity dapat diukur dengan melihat nilai Cross loading. Jika semua indikator mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dengan masing-

masing konstraknya dibandingkan dengan nilai koefisien korelasi indikator pada blok konstruk pada kolom lainnya, maka disimpulkan bahwa masing-masing indikator dalam blok adalah penyusun konstruk dalam kolom tersebut. (Haryono, 2017).

2) Membandingkan nilai akar AVE

Discriminant Validity selanjutnya diukur dengan membandingkan nilai akar AVE setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainya dalam model. Jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainya dalam model maka memiliki nilai discriminant validity yang baik.

Tabel 4. Hasil Nilai Akar AVE dan Korelasi Antar Konstruk
Correlations among l.vs. with sq. rts. Of AVEs

	SAP X1	TI X2	SDM X3	SPIP Z	KLK Y
SAP X1	(0.933)	0.360	0.431	0.371	0.586
TI X2	0.360	(0.891)	0.388	0.294	0.509

SDM X3	0.431	0.388	(0.887)	0.475	0.635
SPIP Z	0.371	0.294	0.475	(0.905)	0.602
KLK Y	0.586	0.509	0.635	0.602	(0.929)

Sumber: Data diolah dengan WarpPLS, 2024

Dari output nomor 1 yaitu Discriminant validity Cross Loading, dapat diketahui semua indikator mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar dengan masing-masing variabelnya sendiri dibandingkan dengan nilai koefisien korelasi indikator dengan variabel lainnya, maka disimpulkan bahwa masing-masing indikator dalam blok adalah penyusun variabel atau konstruk

dalam kolom tersebut.

Discriminant validity selanjutnya diukur dengan membandingkan nilai akar AVE setiap variabel dengan korelasi antara variabel dengan variabel lainnya. Nilai akar AVE dapat dilihat dari output nomor 2.

Dapat diketahui nilai akar AVE dan korelasi konstruk dengan konstruk lainnya sebagai berikut:

Tabel 5. Rekap Hasil Nilai Akar AVE dan Korelasi Antar Konstruk

Variabel	Nilai Akar AVE	Nilai Korelasi Variabel Dengan Variabel lainnya
SAP (X1)	0,933	0,360, 0,431, 0,371, 0,586.
TI (X2)	0,891	0,360, 0,388, 0,294, 0,509.
SDM (X3)	0,887	0,431, 0,388, 0,475, 0,635.
SPIP (Z)	0,905	0,371, 0,294, 0,475, 0,602.
KLK (Y)	0,929	0,586, 0,509, 0,635, 0,602.

Sumber: Data diolah dengan WarpPLS, 2024

Berdasarkan hasil di atas, dapat dilihat nilai akar AVE setiap variabel lebih tinggi daripada nilai korelasi antara variabel tersebut dengan variabel lainnya dalam model. Dengan ini maka dapat dikatakan sesuai uji dengan akar AVE ini model memiliki discriminant validity yang baik.

Uji Inner Model

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat nilai R Square, GoF, dan uji

pengaruh antar variabel.

Analisis R Square

Analisis ini untuk mengetahui besarnya prosentase variabilitas konstruk endogen yang dapat di jelaskan oleh variabilitas konstruk eksogen. Analisis ini juga untuk mengetahui kebaikan model persamaan struktural. Semakin besar angka R-square menunjukkan semakin besar variabel eksogen tersebut dapat menjelaskan variabel endogen sehingga semakin baik persamaan strukturalnya. Tabel nilai R Square sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Nilai R Square

Variabel	Nilai R
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Z)	0,274
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,639

Sumber: Data diolah dengan WarpPLS, 2024

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui hasil sebagai berikut:

1. Nilai R-square variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

sebesar sebesar 0,274. Nilai R-square ini memiliki arti bahwa variabilitas konstruk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar yang dapat di

jelaskan oleh variabilitas konstruk Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 27,4% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar yang diteliti. Menurut Chin (1998) dalam (Ghozali & Latan, 2015), nilai R^2 sebesar 0,67, 0,33, dan 0,19 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate, dan lemah. Dengan ini dapat dikatakan pengaruhnya lemah.

2. Nilai R-square variabel Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,639. Nilai R-square ini memiliki arti bahwa variabilitas konstruk Kualitas Laporan Keuangan yang dapat di jelaskan oleh variabilitas konstruk Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Kualitas Laporan Keuangan

sebesar 63,9% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar yang diteliti.

Menurut Chin (1998) dalam (Ghozali & Latan, 2015), nilai R^2 sebesar 0,67, 0,33, dan 0,19 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate, dan lemah. Dengan ini dapat dikatakan pengaruhnya kuat.

Goodness of Fit Index (GoF)

Untuk mengevaluasi model struktural dan pengukuran secara keseluruhan. GoF indeks ini merupakan ukuran tunggal yang digunakan untuk memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*). Tujuan dari penilaian GoF adalah untuk mengukur kinerja model PLS baik pada tahap pengukuran maupun pada model struktural dengan memfokuskan pada prediksi kinerja keseluruhan model.

Tabel 7. Model Fit

Model Fit and quality indices	Hasil Analisis	Kriteria Fit	Keterangan
<i>Average path coefficient (APC)</i>	0,244, P < 0,001	P-Value < 0,05	Fit
Average R- squared (ARS)	0,456, P < 0,001	P-Value < 0,05	Fit
<i>Average adjusted R-squared (AARS)</i>	0,441, P < 0,001	P-Value < 0,05	Fit
<i>Average block VIF (AVIF)</i>	1,369	Acceptable if < 0,05, Ideally < = 3,3	Ideal
<i>Average full collinearity (AFVIF)</i>	1,798	Acceptable if < 0,05, Ideally < = 3,3	Ideal
<i>Tenenhaus GoF (GoF)</i>	0,614	Small >=0,1 Medium, >=0,25, Large >=0,36	Large
<i>Sympson's paradox ratio (SPR)</i>	1,000	Acceptable if > 0,7, Ideally = 1	Ideal
<i>R- squared contribution ratio (RSCR)</i>	1,000	Acceptable if > 0,9, Ideally = 1	Ideal
<i>Statistical suppression ratio (SSR)</i>	1,000	Acceptable if > 0,7	Fit
<i>Nonlinear bivariate causality direction</i>	1,000	Acceptable if > 0,7	Fit

<i>ratio (NLBCDR)</i>			
-----------------------	--	--	--

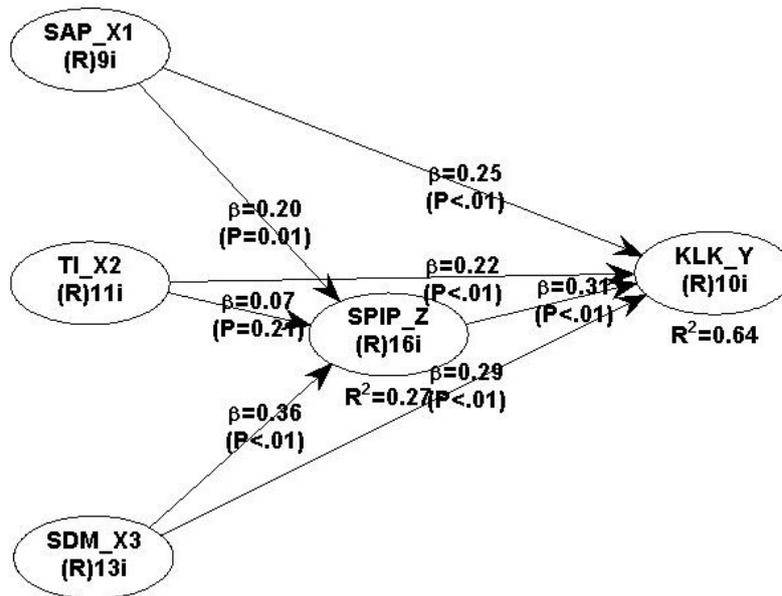
Sumber: Data diolah dengan WarpPLS, 2024

Dengan ini maka dapat disimpulkan model sudah fit.

Pengujian Hipotesis (Pengaruh antar variabel)

Penelitian ini menggunakan

variabel dependen, variabel independen dan variabel intervening. Dimana variabel dependen merupakan penyebab variabel independen atau variabel yang memiliki anak panah yang menuju variabel dependen seperti yang ditunjukkan pada diagram berikut:



Gambar 3. Diagram Jalur

Dalam tahap pengujian hipotesis ini, maka akan di analisis apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian hipotesis yang diajukan dilakukan dengan melihat path coefficients yang menunjukkan koefisien parameter dan nilai

signifikansi t statistik. Signifikansi parameter yang diestimasi dapat memberikan informasi mengenai hubungan antar variabel-variabel penelitian. Batas untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan yaitu menggunakan probabilitas 0,05. Tabel di bawah ini menyajikan output estimasi untuk pengujian model structural:

Tabel 8. Output Uji Hipotesis (Uji Pengaruh antar Variabel)

Path coefficients

	SAP X1	TI X2	SDM X3	SPIP Z	KLK Y
SAP X1	-	-	-	-	-
TI X2	-	-	-	-	-
SDM X3	-	-	-	-	-
SPIP Z	0.202	0.073	0.359	-	-
KLK Y	0.205	0.220	0.288	0.313	-

P Values

	SAP X1	TI X2	SDM X3	SPIP Z	KLK Y
SAP X1	-	-	-	-	-

TI X2	-	-	-	-	-
SDM X3	-	-	-	-	-
SPIP Z	0.010	0.205	<0.001	-	-
KLK Y	0.002	0.006	<0.001	<0.001	

Sumber: Data diolah dengan WarpPLS, 2024

Path analysis: Persamaan Regresi

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji apakah signifikan atau tidaknya hubungan lebih dari dua variabel melalui regresinya. Penelitian ini akan menguji signifikansi antara variabel bebas (X) yang terdiri dari pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap variabel terikat (Y) yakni variabel Kualitas Laporan Keuangan dan variabel intervening yakni (Z) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Persamaan linier regresi berganda dapat dilihat dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SPIP} = 0,202 \text{ SAP} + 0,073 \text{ TI} + 0,359 \text{ SDM}$$

$$\text{KLK} = 0,205 \text{ SAP} + 0,220 \text{ TI} + 0,288 \text{ SDM} + 0,313 \text{ SPIP}$$

Keterangan:

KLK : Kualitas Laporan Keuangan

SAK : Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah

TI : Pemanfaatan Teknologi Informasi

SDM : Kompetensi Sumber Daya Manusia

SPIP : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

e : error

Persamaan diatas menjelaskan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dengan menggunakan Path Coefisien untuk pengaruh variabel independen terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menunjukkan bahwa nilai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sebesar 0,202 positif, nilai Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 0,073 negatif serta Kompetensi SDM

sebesar 0,359 dan positif, menunjukkan bahwa kedua variabel berupa SAP dan Kompetensi SDM tersebut berpengaruh signifikan terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sedangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

2. Hasil penelitian dengan menggunakan Path Coefisien untuk pengaruh variabel independen dan intervening terhadap Kualitas Laporan Keuangan menunjukkan bahwa nilai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah sebesar 0,250 dan positif, nilai Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 0,220 dan positif, Kompetensi SDM sebesar 0,288 dan positif serta Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebesar 0,313 dan positif, menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Uji Pengaruh Variabel Mediasi (Uji Pengaruh Tidak Langsung)

Dalam analisis ini akan dilihat besarnya koefisien pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel terikat terhadap variabel bebas. Selanjutnya dilakukan pengujian pengaruh mediasi untuk mengetahui apakah variabel mediasi atau intervening itu memediasi pengaruh variabel independen terhadap dependen atau tidak.

Hasil uji pengaruh mediasi dapat dilihat pada output Indirect Effect, jika nilai P value kurang dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi.

1. Pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total

Analisis ini untuk mengetahui besarnya koefisien pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total, sehingga dapat diketahui apakah variabel mediasi

memediasi pengaruh variabel independen terhadap dependen atau tidak. Hasil koefisien dapat dilihat pada output *Indirect Effects* dan *Total Effects*. Hasil output sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung

Hipotesis		Nilai Path Coefisien	P-value	Kriteria	Keterangan	Kesimpulan
H8	SAP → SPIP → KLK	0,063	0,159	<0,05	SPIP Tidak Memediasi Pengaruh SAP → KLK	Tidak Diterima
H9	TI → SPIP → KLK	0,023	0,359	<0,05	SPIP Tidak Memediasi Pengaruh TI → KLK	Tidak Diterima
H10	SDM → SPIP → KLK	0,112	0,037	<0,05	SPIP Memediasi Pengaruh SDM → KLK	Diterima

Sumber: Hasil Olah Data dengan WarpPLS, 2024

KESIMPULAN

Dari hasil analisis data pada bab IV di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. SAP dan SPIP saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Penerapan SAP secara konsisten akan mendorong terwujudnya SPIP yang efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan, akuntabilitas dan keterbukaan pemerintah, serta kepercayaan publik.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dan SPIP masih belum jelas dan konklusif. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan metodologi yang lebih kuat dan konteks yang lebih beragam untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih definitif. Pemanfaatan teknologi informasi

sangat penting untuk mendukung SPIP walaupun dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh tidak signifikan. Hal ini dikarenakan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas SPIP dalam berbagai aspek, seperti identifikasi risiko, pemantauan pengendalian, dan pelaporan. Kunci untuk mendapatkan manfaat dari TI adalah dengan memilih teknologi yang tepat serta menerapkannya dengan benar. Instansi pemerintah perlu memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk mengoperasikan dan memelihara sistem teknologi informasi yang digunakan. Pemerintah juga perlu membuat regulasi dan pedoman yang jelas tentang pemanfaatan teknologi informasi untuk SPIP. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan efektif dapat menjadi alat yang berharga untuk meningkatkan SPIP dan mencapai tujuan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap

- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Meningkatkan kompetensi SDM merupakan salah satu langkah penting untuk memperkuat SPIP. Dengan SDM yang kompeten, instansi pemerintah dapat merancang, menerapkan, dan memelihara SPIP yang efektif untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
4. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Standar akuntansi pemerintah merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperkuat tata kelola keuangan pemerintah. Dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah secara konsisten, pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
 5. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi alat yang berharga untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mencapai tujuan pelaporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan andal dengan beberapa alasan dimana memilih teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan entitas pemerintah, menerapkan teknologi informasi dengan benar dan efektif, selanjutnya memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk mengoperasikan dan memelihara sistem teknologi informasi dan terakhir membuat kebijakan dan prosedur yang jelas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk penyusunan laporan keuangan.
 6. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Meningkatkan kompetensi SDM merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan SDM yang kompeten, entitas dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat, andal, akuntabel, dan transparan, sehingga dapat mencapai tujuan pelaporan keuangan yang efektif.
 7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. SPIP merupakan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan menerapkan SPIP yang efektif, instansi pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat mencapai tujuan pelaporan keuangan yang efektif.
 8. Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Meskipun SAP merupakan elemen penting dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, namun penerapannya saja tidak cukup untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan secara signifikan. SPIP memainkan peran yang lebih penting dalam memastikan laporan keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, instansi pemerintah harus memastikan untuk dapat memperkuat penerapan SPIP secara konsisten dan berkelanjutan, meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang akuntansi, pelaporan keuangan, dan pengendalian internal serta membangun budaya organisasi yang akuntabel dan berintegritas. Dengan upaya yang komprehensif ini, instansi pemerintah dapat mencapai tujuan pengelolaan keuangan yang efektif dan menghasilkan LK yang berkualitas tinggi.
 9. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Meskipun teknologi informasi dapat memberikan manfaat dalam proses penyusunan laporan keuangan, namun pemanfaatannya saja tidak cukup untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan secara signifikan. SPIP dan faktor lain seperti kompetensi SDM, kualitas data, dan integrasi teknologi informasi yang tepat dengan SPIP memainkan peran yang lebih penting.

10. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Meningkatkan kompetensi SDM merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui SPIP. Dengan SDM yang kompeten dan SPIP yang efektif, instansi pemerintah dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal, transparan, dan akuntabel, sehingga mencapai tujuan pelaporan keuangan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Widhi Kurniawan, Z. P. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pandiva Buku.
- Amalia, R., Sari, R., & Handayani, E. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 11(1), 51-60.
- Arens, A. A., & Loebbecke, J. J. (2019). *Auditing and Assurance Services: Integrated Approach* (16th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Armel, R. Y., Nazir, A., & Safitri, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai). *Jurnal Online Mahasiswa* Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Vol. 4, No. 1, 1.
- Aswandi, W., Program, J. A., & S1, S. (n.d.). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Sektor Publik (Studi Empiris pada Organisasi Nirlaba di Kota Padang).
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Darwanis, & Mahyani, D. (2009). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Tehnologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 2, 133–151.
- Erlina Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Medan: Brama Ardian. Hal : 21.
- Ghozali, I (2019). *Partial Least Square Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program WarpPLS 7.0* (4th ed.). Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali dan Latan, 2015, “Partial Least Squares, Konsep Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0”. Edisi 2. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Hal: 77, 81, 78, 83
- Haryono, Siswoyo, 2017, “Metode SEM Untuk Penelitian Manajemen dengan AMOS Lisrel PLS”. Cetakan I. Penerbit Luxima Metro Media, Jakarta. Hal: 405, 375, 421, 410, 255.
- Hasanudin, Nurwulandari, A., Nurhayati, Y., & Nasional Jakarta, U. (2021). Effect of Revolving Funds, Competence of Human Resources, Working Capital, Credit Risk on The Performance of Microfinance Institutions (Agribusiness (MFI-A) Moderated by Risk Management Training. 5(1).
- Hermawan dan Hasibuan, 2016, “Analisis Pengaruh Tingkat Pengalaman Dan Coaching Style Terhadap Kualitas Kepemimpinan Manajer Proyek Dalam Upaya Peningkatan Produktivitas di PT.J”. *Jurnal PASTI Volume XI No. 1*, 84 - 97, Universitas Mercu Buana, Jln. Meruya Selatan No. 1 Jakarta. Hal:88.
- Hussein, Ananda, 2015, “Penelitian Bisnis dan Manajemen Menggunakan Partial Least Squares (PLS) dengan SmartPLS 3.0”. Modul Ajar, Jurusan Manajemen,

- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Hal: 25
- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/rab.040148>
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Marisa, D. H. D., Pagar Alam No, J. Z., & Lampung, B. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Instansi Pemerintah yang Berstatus Badan Layanan Umum di Provinsi Lampung.
- Mokoginta, N., Lambey, L., Pontoh, W., Ekonomi dan Bisnis, F., Akuntansi, J., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. In *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* (Vol. 12, Issue 2).
- Muh Akbar Saputra, A., Ramadhani, K., Ramadhani, S., & Studi Pendidikan Teknologi Informasi, P. (2023). Penggunaan Media Augmented Reality Pada (Vol. 1, Issue 1).
- Nasir, A., & Oktari, V. W. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman*, 10(2), 279-290.
- O'Brien, James.A. (2005). *Introduction to Information System*. McGraw-Hill. New York.
- Parinding, S., Sari, N., Dasila, R. A., Studi, P., Fakultas, A., Dan, E., & Artikel, P. (2023). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Palopo. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(1), 97–111. <https://doi.org/10.30813/jab.v16>
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (2005).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. (2008).
- Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2001).
- Priyatno, Duwi, 2013, “Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS”, Yogyakarta: Media Kom.
- PSAK Nomor 1 Tahun 2015. (2015).
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>
- Rahmawati, F., Yuliana, S., & Ardianto, T. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 10(1), 31-42.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- Salsiah, A. (2020). Kemampuan Menyusun Hipotesis Dalam Pembelajaran IPA Melalui Metode Eksperimen Pada Peserta Didik Kelas V Sekolah Dasar. 12-26
- Saputra. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. *CASH*, 4(02), 82–96. <https://doi.org/10.52624/cash.v4i02.1783>
- Saputra, Rahayu, S., & Yudi. (2020). The Implementation of Government Accounting Standards, The Government Internal Control System and The Competence of Human Resources of

- Quality of Financial Statement With Organizational Comitments As Moderating Variabel In Tanjung Jabung Barat. In Oktober-Desember (Vol. 5, Issue 4). <https://online-journal.unja.ac.id/jaku>
- Sari, D. R., Riris, S., & Mulyaningsih, S. (2022). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan di Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 10(1), 43-52.
- Sofyani, Hafiez, 2013, Modul Praktik Partial Least Square (PLS), Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Hal: 27, 28, 34
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
- Suharto, Y., Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta, B., & Hariadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta, E. (2021). Analisis Kualitas Website Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Menggunakan Metode Webqual 4.0 Website Quality Analysis of Human Resources Development Agency Using Webqual 4.0 Method. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi (JMO)*, 12(2), 109–121. <https://www.bpsdm.jakarta.go.id>
- Sutarman. 2019. Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta: Bumi Aksara
- Tjiptoherijanto, Prijono (2001). Proyeksi Penduduk, Angkatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Peran Serikat Pekerja dalam Peningkatan Kesejahteraan. *Majalah Perencanaan Pembangunan*. Edisi 23 tahun 2001.
- Turban, E, 2005, Decision Support Systems and Intelligent Systems Edisi Bahasa Indonesia Jilid 1, Andi, Yogyakarta.
- Utomo, S. D., Haryadi, B., & Sari, R. (2020). The Effect of Information Technology on Financial Reporting Quality: Evidence from Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Accounting, Economics and Research*, 11(1), 1-10.
- Widarjono, Agus, 2015, “Analisis Multivariate Terapan Dengan Program SPSS, AMOS, dan SmartPLS”. Edisi II, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Wijaya, I., & Pratiwi, N. (2021). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 16(2), 141-152.